

Sekuritisasi China Fine Dust Oleh Pemerintah Korea Selatan Terhadap Tiongkok

Frequency of International Relations
September, Vol 2 (2) 111-141
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : September 13, 2020
Accepted : January 26, 2021
Available On-line: February 24, 2021

Eryolanda Putri Nabila

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas
eryolandanabila@gmail.com

Abstract

China Fine Dust issue has emerged in 2013 and increase in 2014 so that South Korea suffered from the impact. Meanwhile, China as a contributor of the haze refuses to take responsibility for tackling this issue, so that South Korea must securitize. This study aims to describe the process of securitization of China Fine Dust issue carried out by South Korea to China by using the concept of securitization by Barry Buzan as an analytical framework. This theory relies on the power of political ideas and actions of actors to spread an issue into a security discourse in the presence of those who are threatened. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data used in this research was collected through literature study. The securitization process carried out by the South Korean Government against China began with South Korea carrying out a scientific agenda to identify a threat with China's initial involvement of 48%. Then political agenda, which are three points; influencing the public to gain support, forming a domestic emergency policy, holding a bilateral meeting to convince China to work together because domestic actions are not enough yet. The continuation of political management shows that the agenda of securitization carried out by South Korea made China accept the issue as a threat and agreed to cooperate in tackling the haze issue by releasing several projects.

Keywords: *China, China Fine Dust, securitization, South Korea*

Pendahuluan

CFD (China Fine Dust) atau dalam bahasa Korea Mise Meonji Oyeom merupakan permasalahan regional terkait polusi udara yang disebabkan oleh partikel-partikel halus (debu) yang sebagian besar berasal dari asap mesin pembakaran internal dan asap cerobong pabrik di Tiongkok yang menyebar melalui angin barat yang kuat dan stabil (Saphiro 2018, 21). Kabut asap akan dikategorikan berbahaya bagi tubuh manusia jika kurang dari 10 mikrometer (PM 10) dan lebih berbahaya (ultrafine) lagi jika partikel kurang dari 2.5 mikrometer (PM 2.5) (Ji Young 2018, 183-184).

Korea Selatan menjadi salah satu negara paling rentan menerima kabut asap dikarenakan geografis yang berdekatan. Pakar meteorologi memperkirakan bahwa 49% dari polusi udara dan 50% hujan asam di Korea Selatan berkaitan dengan kabut asap Tiongkok yang meningkat dibulan Maret hingga Mei (Henry 2012, 567-568). Kabut asap ini mulai mengancam tahun 2013 hingga meningkatnya kesadaran publik di tahun 2014 yang mengecam Tiongkok akibat tindakannya memindahkan beberapa pabrik ke Tianjin yang dekat dengan Korea Selatan (Soyeon 2018). Maraknya pemberitaan media massa, membuat masyarakat Korea Selatan ramai berkomentar dalam komunitas online menyalahkan Tiongkok. Mereka juga menandatangani petisi di website Blue House agar pemerintah dapat meminta pertanggungjawaban Tiongkok (Tae Dong 2019, 2). Akibat

hal ini lebih dari 50% masyarakat Korea Selatan menganggap isu ini sebagai ancaman. Hal ini dikarenakan berbagai dampak yang ditimbulkan seperti kanker, keguguran, asma, kematian dini, dan kerugian materil (Saphiro 2018, 5). Tahun 2014, peneliti lingkungan Universitas Yonsei memperkirakan sekitar 1.179 orang meninggal setiap tahunnya karena kabut asap yang tersebar diseluruh kota (Korea Jong Ang Daily 2018). Korea Selatan juga mengalami kerugian ekonomi sebanyak 4,32 miliar won setiap tahunnya (Yamada 2019).

Secara domestik, pemerintah Korea Selatan telah melakukan serangkaian upaya untuk meminimalisir polusi kabut asap. Salah satunya “Special measures for Fine Dust Management” yang diumumkan pada 3 juni tahun 2016. Dalam hal ini pemerintah Korea Selatan membentuk alarm darurat yang mampu mendeteksi kabut asap berbahaya yang dapat digunakan oleh masyarakat melalui smartphone, free bus pada jam sibuk, bahkan membentuk undang-undang darurat. Kelompok aktivis lingkungan Korea Selatan juga menekankan tingginya ancaman kabut asap dan kebutuhan untuk merancang cara untuk mengatasinya.

Respon dan tindakan pemerintah Tiongkok juga diperlukan mengingat ini merupakan ancaman lintas batas yang perlu diatasi bersama. Berdasarkan respon masyarakat Tiongkok, 75% masyarakat merespon kabut asap sebagai ancaman yang akan semakin memburuk

di tahun berikutnya (Saphiro 2016), akan tetapi Pemerintah Tiongkok dianggap lebih melihat keuntungan besar dari industri yang mampu meningkatkan perekonomian sehingga masyarakat hanya diberikan peringatan melalui media tanpa ada tindakan pasti, yang secara tidak langsung Tiongkok mengabaikan beberapa industri penghasil polusi udara tinggi (Otsuka 2018, 2). Jepang sebagai negara yang memiliki kedekatan geografis dengan Tiongkok juga merasa bahwa isu ini penting mengingat ancaman yang ada. Tadashi Manabe dari Fukuoka Internasional Association merespon bahwa kabut asap telah tersebar dan meningkat di Jepang yang berhembus dari Tiongkok, sehingga Pemerintah Jepang memberikan seruan untuk mengurangi aktifitas outdoor bahkan berbagai penerbangan harus dibatalkan (DW News 2019). Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung Wha juga membenarkan Tiongkok sebagai negara penyumbang kabut asap (Khaliq 2019). Namun tampaknya Tiongkok enggan bertanggung jawab dalam masalah ini, dimana Menteri Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang membantah bahwa ia tidak yakin ada cukup bukti yang membuktikan kabut asap tersebut berasal dari negaranya (Jeju weekly 2019). Hal ini membuat Tiongkok justru meminta Korea Selatan lebih memperhatikan dan mengurus negaranya (Korea Herald 2019).

Korea Selatan sebagai negara middle power harus memikirkan langkah tepat namun bukan dengan konfrontasi akibat

ketergantungan dalam aspek politik dan juga ekonomi sehingga khawatir akan mengganggu kepentingan nasional lainnya (Syahrin 2018, 29). Korea Selatan memilih jalan berunding untuk mempengaruhi Tiongkok. Tahun 2019 Moon Jae In menghadiri pertemuan ke-23 Korsel-Tiongkok terkait isu keamanan lingkungan, dimana Korea Selatan melakukan diskusi dengan Tiongkok untuk meyakinkannya terkait penanggulangan kabut asap yang semakin parah menimbang dampak yang ditimbulkan dalam beberapa kurun waktu (MOFA Kr 2019).

Moon Jae In dalam pidatonya menyatakan “The people had to suffer greatly last week due to an unprecedented number of days of dense fine dust. We know that there is a great deal of public concern because of fine dust coming from China, and because China is also suffering from fine dust, it’s necessary to strengthen cooperation to reduce fine dust.” (The Straits Times 2019) Pernyataan ini merupakan bentuk speech act yang disampaikan oleh Korea Selatan untuk meyakinkan Tiongkok bahwa isu ini telah menjadi ancaman nyata, sehingga harus ada kesepakatan bersama untuk menanggulangi kabut asap mengingat dampak serius yang ditimbulkan dalam beberapa kurun waktu di negara-negara kawasan Asia Timur Laut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mencoba untuk menjelaskan proses secara detail. Selanjutnya metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis literatur yang relevan dengan isu tersebut, kemudian mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data hingga menganalisisnya secara keseluruhan (Creswell 1994, 38). Nantinya jawaban penelitian disesuaikan dengan konsep yang sesuai dengan kajian ilmu hubungan internasional yaitu konsep sekuritisasi.

Sekuritisasi muncul dari dialektika wacana keamanan. Dapat diartikan sebagai suatu proses politik untuk menjadikan isu yang ada sebagai ancaman dalam wacana keamanan, sehingga hal ini kemudian akan menjadi wacana nasional. Teori ini sangat bergantung pada kekuatan ide dan tindakan politis aktor untuk menyebarkan suatu isu menjadi wacana keamanan dengan adanya pihak-pihak yang terancam (Buzan 1998, 24-27). Kekuatan ide dan tindakan politis tersebut dapat ditunjukkan melalui speech act. Speech act merupakan pernyataan yang disampaikan oleh aktor sekuritisasi untuk melabeli sebuah isu menjadi isu keamanan. Pernyataan yang disampaikan pun beragam, bisa berupa pidato, demonstrasi, publikasi, dsb. Dengan adanya klaim internal, maka akan terbentuk suatu skema bahwa terdapat ancaman yang nyata adanya.

Dalam konsep keamanan yang diusung oleh Copenhagen School, Buzan dan Waever menjelaskan aktor akan melakukan sekuritisasi ketika sebuah isu dinilai darurat (Buzan 1998, 24). Setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi tidak akan terlepas dari adanya speech act. Pernyataan disampaikan untuk membangun nilai dan pandangan baru bahwa fenomena yang awalnya hanya dianggap biasa saja menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan nasional sehingga menjadi agenda keamanan penting bagi nasional dan internasional (Austin 2011, 3). Terdapat 5 sektor yang termasuk ruang lingkup isu keamanan, diantaranya militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Buzan, sebuah isu politis akan berkembang menjadi isu sekuritisasi melalui tindakan optimal dari aktor sekuritisasi (pemerintah, partai, kelompok, oposisi, dan masyarakat). Kemudian terbentuknya isu keamanan tidak hanya disebabkan karena isu tersebut benar-benar mengancam, tetapi juga dapat dimunculkan sebagai isu yang mengancam (Buzan 1998, 24-25). Kasus China Fine Dust merupakan bentuk isu yang dimunculkan sebagai ancaman berdasarkan kerugian dari dampak yang ditimbulkan dalam kurun waktu 6 tahun (2013-2014). Korea Selatan kemudian bertindak sebagai aktor sekuritisasi yang memunculkan isu ini sebagai ancaman untuk mendapatkan dukungan dalam melakukan sekuritisasi.

Waever menambahkan ada beberapa elemen penting yang diperlukan dalam menganalisis sekuritisasi (Floyd , 13) :

Aktor sekuritisasi menjadi pihak yang mewacanakan sebuah isu berada dalam level sekuritisasi melalui sebuah referent object (objek yang terancam). Dalam kasus ini Korea Selatan sebagai pihak yang terancam telah mewacanakan isu kabut asap sebagai ancaman keamanan dan meyakinkan audience bahwa ancaman tersebut nyata adanya dan harus ditindaklanjuti

Referent object yaitu pihak yang terancam oleh adanya ancaman eksistensial dan harus diamankan. Referent objek tidak hanya negara namun juga masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini yang menjadi referent objectnya adalah masyarakat Korea Selatan yang terancam kehidupannya akibat kualitas udara yang buruk karena tingginya polusi kabut asap

Ancaman eksistensial merupakan aspek yang nyata adanya dan mengancam referent object sehingga diklaim sebagai ancaman darurat. Dalam hal ini, isu keamanan yang awalnya dapat dilakukan melalui politik normal akan bertransformasi menjadi politik darurat yang ditindak lanjuti secara cepat. Isu kabut asap yang terjadi diidentifikasi sebagai bentuk dari ancaman eksistensial yang terus ada bahkan meningkat.

Audience merupakan pihak yang ingin dipengaruhi oleh aktor sekuritisasi yang merasa bahwa sebuah isu telah menjadi ancaman yang nyata. Tiongkok dikategorikan sebagai audience yang ingin

dipengaruhi oleh aktor sekuritisasi (Korea Selatan), baik melalui media, opini publik hingga pidato yang disampaikan. Hal ini dikarenakan untuk mengangkat sebuah isu menjadi sekuritisasi perlu diperkuat dengan adanya kesepakatan bahwa isu tersebut merupakan ancaman. Industri Tiongkok telah menjadi sumber dari ancaman eksistensial yang merugikan banyak pihak.

Setelah mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam sekuritisasi maka perlu memahami proses sekuritisasi untuk melihat perkembangan isu yang terjadi. Dalam sektor keamanan lingkungan, Buzan menjelaskan proses sekuritisasi dilakukan melalui 2 agenda (Buzan 1998, 71-72):

1. Scientific Agenda

Agenda ilmiah berkembang melalui perdebatan ilmu dan kegiatan organisasi non-pemerintah. Hal ini dilakukan di luar inti politik yang umumnya dilakukan oleh lembaga penelitian dan ilmuwan yang memberikan informasi mengenai permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan tersebut diidentifikasi sebagai masalah yang telah atau berpotensi menimbulkan ancaman. Pada identifikasi masalah tersebut didukung oleh adanya data-data penelitian sehingga hal ini akan mempengaruhi kelanjutan pada agenda politik.

2. Political Agenda

Agenda politik pada dasarnya merupakan pergerakan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi baik dalam level pemerintah dan antarpemerintah. Tindakan ini terdiri dari proses pengambilan keputusan publik dan kebijakan publik tentang penanganan masalah lingkungan. Oleh karena itu, agenda politik ini akan memperlihatkan bentuk politisasi dan sekuritisasi secara keseluruhan. Agenda politik akan mempengaruhi tiga hal, yaitu: (1) kesadaran negara dan publik terhadap masalah yang dimunculkan oleh agenda ilmiah (hal ini berkaitan dengan seberapa banyak hal tersebut diakui oleh para pembuat kebijakan dan perantara seperti pers atau media massa); (2)Penerimaan tanggung jawab politik untuk menangani permasalahan yang terjadi; (3)Kelanjutan manajemen politik apakah isu yang disekuritisasi tersebut menghasilkan kerjasama internasional dan institusional (Buzan 1998, 72).

Rasionalisasi dalam mengangkat sekuritisasi sebagai landasan teori karena dirasa cocok sebagai pisau pembedah masalah yang diteliti oleh penulis, yaitu CFD. Kabut asap yang awalnya hanya berada dalam lingkup domestik Tiongkok, sekarang telah menjadi ancaman lintas batas karena penyebarannya ke beberapa negara tetangga seperti Korea Selatan dan Jepang. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang ada dan kerugian yang ditimbulkan. Akibatnya negara

yang merasa dirugikan mengambil langkah untuk melayangkan protes karena dampak serius yang telah mengancam berbagai aspek, sehingga isu ini diwacanakan sebagai isu keamanan.

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana sekuritisasi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam mewacanakan kabut asap lintas batas melalui serangkaian proses sekuritisasi. Sebelum itu peneliti akan melakukan identifikasi terhadap elemen-elemen sekuritisasi pada kasus ini, seperti Pemerintah Korea Selatan sebagai aktor sekuritisasi yang merasa bahwa objek referensinya yaitu masyarakat dan negara telah terancam oleh kabut asap CFD. Kemudian Tiongkok sebagai negara penyumbang kabut asap dikategorikan sebagai audience yang akan dipengaruhi oleh Pemerintah Korea Selatan dalam tahap sekuritisasi.

Kemudian lanjut untuk memahami sejauh mana isu kabut asap ini dibawa oleh pemerintah Korea Selatan melalui proses sekuritisasi lingkungan yang dijelaskan oleh Buzan, yaitu agenda ilmiah dan agenda politik. Buzan dan Waever menganggap suatu isu dapat dikatakan mengancam dan meningkat pada level internasional ketika isu ini lebih penting dibanding isu yang lainnya. Jika dikaitkan dengan isu kabut asap yang peneliti angkat, isu ini telah menjadi keyword berita di Korea Selatan dalam beberapa waktu dimana masyarakat bahkan lebih khawatir terhadap kasus ini dibanding

kasus nuklir ancaman Korea Utara, dikarenakan dampak yang lebih nyata dirasakan oleh masyarakat. Selain itu Moon Jae In juga melayangkan pidatonya untuk meyakinkan Tiongkok bahwa isu ini telah menjadi ancaman. Mengingat bahwa Tiongkok lewat Partai Komunis Tiongkok (PKT) memiliki perhatian terhadap masalah lingkungan melalui konsep Ecological Civilization. Konsep ini mengintegrasikan aspek ekologis dengan kebijakan ekonomi dan gaya hidup (Zhou et al, 2018; Permata, 2020). Ini menunjukkan bahwa Tiongkok dapat dipersuasi menyelesaikan masalah kabut asap ini. Nanti diakhir, setelah menemukan berbagai data baik pernyataan maupun tindakan, maka peneliti akan menentukan apakah sekuritisasi yang dilakukan oleh Korea Selatan berhasil dengan melihat komponen keberhasilan dari sekuritisasi.

Hasil

Tindakan sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan tidak terlepas dari speech act ditunjukkan melalui penyampaian pidato resmi atau melalui pernyataan dalam sebuah forum resmi maupun media. Dukungan publik Korea Selatan akan memperlancar proses sekuritisasi dalam membentuk kebijakan publik dan melakukan tindakan darurat dalam meyakinkan Tiongkok untuk bekerjasama.

Tahap Scientific Agenda dapat dikatakan sebagai langkah dalam mengidentifikasi isu yang dilakukan oleh ilmuwan dan NGO untuk memperoleh data terkait potensi ancaman. Beberapa data-data yang diperoleh :

1. Isu muncul tahun 2013

Penelitian Saphiro menunjukkan kabut asap CFD terbawa oleh angin dari Tiongkok hasil manufaktur, produksi energi, dan cerobong asap pabrik industri (Saphiro 2018, 6)

Profesor Departemen Atmosfer dan Ilmu Lingkungan Universitas Seoul, Dong Jong-in menyatakan: bahwa kabut asap CFD yang berhembus dari negara luar menjadi faktor ancaman utama (VOA News 2019)

Penelitian Sunyoung Park dari Universitas Nasional Kyungpok menunjukkan Tiongkok memiliki persentase yang tinggi sebagai negara penyumbang kabut asap. (dan polusi tersebut umumnya bersumber dari industri pabrik Tiongkok yang menunjukkan 700.000 ton PM2.5 akibat proses pembakaran industri manufaktur) (The Guardian 2019)

Data WHO menyebutkan konsentrasi kabut asap di Korea Selatan telah melebihi standar WHO terutama Seoul yang melebihi

40 μ g/m³ sehingga ini layak disebut sebagai ancaman (Ji Young 2018, 183-184)

Pakar meteorologi Korea Selatan yang menunjukkan keterlibatan awal Tiongkok sebagai penyumbang kabut asap mencapai 49% dan korban dampak negatif terhadap kesehatan akibat polusi udara terus bertambah hingga mencapai 80% (Ohara 2018)

Lee Se Gyeol sekjen KFEM Seoul mengungkapkan dampak kesehatan yang akan terjadi jika permasalahan ini tidak cepat ditangani adalah meningkatnya frekuensi terjangkit stroke, pneumonia, hingga kematian dini (Citylab 2018)

Korea Selatan melibatkan 580 peneliti dari 72 institusi untuk meneliti kasus kabut asap CFD. Kemudian menyediakan tiga pesawat, dua kapal, dan 300 lokasi pemantauan darat untuk melacak keterlibatan Tiongkok. Selain itu, kontribusi media dibutuhkan untuk mempengaruhi publik agar pemerintah mendapatkan dukungan dalam tindakan sekuritisasi. Berbagai data dapat kita temukan pada beberapa media besar Korea Selatan seperti Yonhap News, The Korea Herald, The Guardian, The Korea Times yang menyajikan informasi terkait isu kabut asap CFD. Kemudian berita dari berbagai stasiun televisi seperti KBS, MBC, ARIRANG ataupun youtube Asian Boss. Selain itu hasil pertemuan bilateral dapat diakses pada halaman resmi website pemerintah seperti situs Kementerian Luar Negeri Korea

Selatan (www.mofa.go.kr) dan situs Kementerian Lingkungan (<https://eng.me.go.kr>). Hasil riset yang peneliti temukan pada bagian ini menunjukkan Pemerintah Korea Selatan telah melakukan speech act lebih kurang 400 speech act. Pernyataan-pernyataan tersebut diungkapkan oleh pemerintah dan elit politik seperti presiden, perdana menteri, menteri lingkungan, dan juga kepala NCCA (komite khusus penanggulangan isu polusi udara). Salah satunya speech act yang disampaikan oleh Presiden Moon Jae In bahwa sudah seharusnya menjadi tugas negara ketika permasalahan yang muncul mengancam pada kehidupan, sehingga perlu penanganan untuk melindungi masyarakat. Secara umum, adanya scientific agenda dalam proses sekuritisasi dilakukan agar isu yang diwacanakan Pemerintah memiliki klaim yang sah didukung dengan data-data yang ada. Rasionalisasinya hal tersebut tentunya akan mempermudah Pemerintah Korea Selatan selaku aktor yang mewacanakan kabut asap CFD sebagai isu keamanan.

Kemudian lanjut pada tahap political agenda terdapat tiga hal penting:

1. Kesadaran negara dan publik terhadap masalah CFD

Kesadaran publik pun meningkat di tahun 2014 dan mendukung pemerintah Korsel untuk melakukan tindakan darurat. Faktanya ini tidak terlepas dari peran media yang mengeluarkan

berita mengenai isu kabut asap CFD. Sekitar 1200 artikel koran dari lima koran terkenal di Korea Selatan memuat tentang peran Tiongkok sebagai sumber polusi udara yang terjadi di Korea Selatan (Saphiro 2018, 6). Berdasarkan pada laporan Yonhap umumnya media Korea Selatan menaruh kata kunci “air pollution”, “particulate matter”, “china”, “economy”, “health”. Bukti meningkatnya kesadaran publik adalah 50% Publik Korea Selatan ramai berkomentar dan menandatangani petisi di website Blue House meminta pemerintah mengurus hal ini dengan meminta tanggung jawab Tiongkok. 68,3% sepakat bahwa isu ini ancaman yang mengganggu keamanan lingkungan sehingga mereka butuh perlindungan dari pemerintah (Rezqi 2016, 160). Kemudian muncul artikel sindiran “government gets tough on “anti-pollution” cosmetic” agar pemerintah segera bertindak menemukan alternatif dari permasalahan ini (Korea Times 2018). Perumpamaan kosmetik karena kosmetik dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat Korea Selatan dan dipercaya dapat mencegah kerusakan kulit dari kabut asap berbahaya. Pada bagian ini peneliti merasa bahwa peran media dan pemerintah berhasil dalam memunculkan isu ke ruang publik.

2. Tanggung jawab politik untuk menangani CFD

Tahun 2016 pemerintah Korea Selatan membentuk kebijakan darurat Special Measure For Fine Dust Management (Ji Young 2018, 184-185):

No	Special Measure for Fines Dust Management	Analisis
1.	Mengurangi bahan-bahan kimiawi yang dapat merusak lingkungan	Tindakan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang tepat dilakukan. Bahan-bahan kimiawi yang tidak diproses dengan baik dan berlebihan akan dapat membahayakan lingkungan. Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa Korea Selatan juga menyumbang polusi sekitar 15% sehingga bukan tidak mungkin pabrik-pabrik tersebut yang menyumbang polusi udara yang terjadi (Saphiro 2018, 3).
2.	Pengurangan debu halus dan CO2 dengan melarang beberapa kendaraan masuk ke pusat kota	Pemerintah memberlakukan tindakan tersebut akibat kota-kota besar di Korea Selatan terus berada pada tingkat polusi tertinggi. Ini juga memperlihatkan keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi CFD. Pemerintah Korea Selatan secara tegas memberikan denda \$120 bagi pengemudi yang melanggar aturan (The Straits Times 2018). Selain itu, nyatanya Pemerintah juga menawarkan solusi dengan menyarankan masyarakatnya untuk beralih menggunakan mobil

		<p>listrik yang dinilai lebih ramah lingkungan. Alhasil dalam beberapa tahun belakangan nyatanya penggunaan mobil listrik telah meningkat di Korea Selatan. Dalam hal ini peneliti melihat adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengurangi kabut asap berbahaya.</p>
3.	<p>Meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga</p>	<p>Kebijakan ini merupakan salah satu tujuan utama dari tindakan sekuritisasi Pemerintah Korea Selatan. Mengingat CFD bukanlah isu domestik melainkan lintas batas, sehingga Pemerintah Korea Selatan perlu meningkatkan kerja sama lingkungan terutama dengan Tiongkok yang bertanggungjawab atas masalah yang muncul. Peneliti juga melihat kebijakan ini berkaitan dengan visi dari Korea Selatan yang ingin mewujudkan green economy, yaitu terjaminnya keseimbangan antara keamanan lingkungan dan ekonomi (MOFA Kr 2019).</p>
4.	<p>Membentuk alarm darurat dan pemberitahuan ramalan cuaca yang muncul melalui smartphone.</p>	<p>Dalam hal ini peneliti melihat Korea Selatan sebagai negara yang terdepan dalam kecanggihan teknologi, tentunya akan memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan inovasi yaitu membentuk alarm yang dapat mendeteksi kabut asap dan ramalan cuaca yang muncul sebagai pemberitahuan disetiap smartphone. ini membantu masyarakat Korea Selatan yang mengeluhkan bahwa mereka kesulitan untuk keluar rumah dikarenakan kabut asap dapat mempengaruhi kesehatan,</p>

5.	Memberlakukan bus gratis bagi masyarakat dan memberikan sejumlah fasilitas.	peneliti melihat adanya keseriusan Pemerintah Korea Selatan dalam menangani isu kabut asap. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh walikota Seoul, Park Won Soon, "The Value of Human beings is far greater than that of money." Pernyataan yang disampaikan tersebut dibuktikan dengan Pemerintah Korea Selatan memberikan dana sebesar \$5,9 miliar untuk menanggulangi kabut asap di negaranya (Joori Roh 2019).
----	---	---

Sumber: Tabel diolah oleh peneliti

Keseriusan Korea Selatan dalam menanggulangi permasalahan ini juga tidak terlepas dari penandatanganan Paris Agreement di tahun 2016, dimana Korea Selatan telah berkomitmen untuk membersihkan udara negaranya. Namun, tahun 2018 Hyundai Research Institute, Korea Selatan mengalami kerugian sebesar 4,32 milyar won (Yamada 2019). OECD juga memprediksi CFD dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar sekitar 20 triliun won pada ekonomi Korea Selatan hingga tahun 2060 karena hilangnya kapasitas tenaga kerja dan biaya tinggi dalam pelayanan kesehatan

Kelanjutan manajemen politik menuju kerja sama internasional. Setelah serangkaian tindakan domestik yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan namun hal tersebut tidak cukup, maka Tahap ini lebih menyorot tindakan Pemerintah Korea Selatan dalam level untuk meyakinkan Tiongkok sebagai audience. Sebelumnya Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa mereka telah melakukan

serangkaian tindakan domestik, diantaranya: 1) sejak tahun 2013, seluruh kualitas udara di Tiongkok telah ditingkatkan, termasuk Beijing dan kota-kota besar lainnya diatas 40% (Jeju weekly 2019); 2) Membentuk agenda the Action Plan on Air Pollution Prevention and Control yang diimplementasikan sejak tahun 2013-2016 (Dong Yao 2018, 47); 3) Dalam rentang waktu 5 tahun, Tiongkok mengucurkan dana anggaran sebesar 11,2 miliar yuan untuk mengendalikan polusi udara; 4) renovasi terhadap struktur dari tiga sektor utama yaitu industri, energi, dan transportasi Dong Yao 2018, 29-52).

Namun Tiongkok menunjukkan keengganan bertanggung jawab terhadap Korea Selatan akibat tidak begitu yakin dengan data yang ada seperti pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang yang menyebut :“I’m not sure if there is sufficient evidence in Korea that the smog comes from China.”(Yamada 2019) sementara data menunjukkan keterlibatan Tiongkok dengan persentase awal 49% dan semakin meningkat pertahunnya dimana penelitian 2019 menyebutkan telah mencapai 82%. Perdebatan pandangan ini menjadi tantangan bagi Korea Selatan meyakinkan Tiongkok dalam proses sekuritisasi CFD.

Diskusi dan Analisis

Korea Selatan gencar melakukan pertemuan dengan Tiongkok untuk menyampaikan tujuannya mengenai langkah efektif penanggulangan CFD. Puncak dari pertemuan bilateral ini terjadi

pada tahun 2019. Pada tanggal 22-23 Januari 2019 Korea Selatan melakukan pertemuan yang ke-23 dengan Tiongkok di Seoul yang menyinggung mengenai CFD. Presiden Moon Jae In mengungkapkan bahwa kabut asap semakin parah dan Korea Selatan sulit untuk membereskan permasalahan ini secara mandiri (MOFA Kr 2019). Kang Kyung Hwa menyatakan keterlibatan besar Tiongkok . Kemudian ini direspon oleh Menlu Tiongkok Lu Kang yang tidak yakin Tiongkok sebagai penyebab utama. Perdebatan ini kemudian membuat Presiden Moon Jae In kembali meyakinkan Tiongkok perlu bekerjasama.

Kedua negara membentuk subkomite untuk berbagi informasi dalam rencana menanggulangi CFD. Korea Selatan pun memperkenalkan sistem alarm darurat. Kemudian, Kedua negara akan memperluas proyek melalui “blue skies project” untuk mengidentifikasi alasan kabut asap dan lintasannya. Pada tanggal 1 Maret 2019, Dewan Nasional Korea Selatan membentuk sebuah badan nasional “NCCA” untuk mengatasi CFD melalui kerjasama internasional (East Asia Forum 2019). Pada 2 Mei 2019, Ban Ki Moon selaku sebagai kepala NCCA melakukan pertemuan dengan Tiongkok meyakinkan bahwa tindakan saling menyalahkan bukan solusi terbaik untuk menangani CFD (Yonhap News 2019). Hal ini nyatanya membuat Presiden Tiongkok, Xi Jin Ping setuju dengan pernyataan

tersebut dengan menganggap bahwa mereka juga melihat permasalahan ini secara serius.

Pada tanggal 4 November 2019, Menteri Lingkungan Korea Selatan melakukan pertemuan kembali dengan Tiongkok melanjutkan pertemuan Perdana Menteri Lee Nak Yon dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Ganjie yang setuju untuk melakukan kerjasama dan menandatangani rencana proyek kerjasama lingkungan kedua negara (Yonhap News 2019). Pada bulan Desember 2019 isu kabut asap CFD ditetapkan sebagai isu lingkungan paling penting sesuai polling dari Universitas Nasional Seoul dan ACCEH (Asia Citizen's Center for Environment and Health) menduduki peringkat teratas dengan 59% responden. Sebelumnya 2017 voting 37% dan tahun 2018 voting 57%.

Kesimpulan

Dalam proses sekuritisasi isu kabut asap CFD, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Korea Selatan telah melakukan beberapa tahapan sekuritisasi yaitu scientific agenda dan political agenda dalam rentang waktu 2013-2019. Selama enam tahun tersebut serangkaian tindakan dimulai dari mengumpulkan data terkait ancaman kabut asap CFD berdasarkan penelitian ilmiah ilmuwan dan temuan NGO. Kemudian pada political agenda Pemerintah Korea Selatan membentuk kebijakan darurat Special Measures for Fine Dust Management untuk melindungi publik Korea Selatan. Kebijakan

tersebut tersebut memuat aturan pelarangan mobil berbahan bakal diesel, peningkatan kerjasama, membentuk alarm darurat, pemberian fasilitas gratis. Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan dana ekstra sebesar US\$5,9 milyar. Akibat meningkatnya kabut asap, Pemerintah Korea Selatan menyebut CFD sebagai social disaster. Tahun 2019 merupakan puncak dari proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Tiongkok, dimana pertemuan gencar dilakukan untuk meyakinkan Tiongkok bertanggung jawab menanggulangi isu bersama. Meski awalnya Tiongkok menunjukkan keengganannya namun pada bulan November 2019 Korea Selatan dan Tiongkok setuju bekerjasama menanggulangi kabut asap melalui Blue Skies Project.

Melalui proses sekuritisasi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa usaha Korea Selatan dalam mewacanakan isu CFD sebagai social disaster berhasil dengan dibentuknya kerjasama dengan Tiongkok dan kesamaan pandangan bahwa isu kabut asap CFD merupakan ancaman. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dibanding sebelumnya saat Tiongkok menolak bertanggung jawab dan terjadi perdebatan antara Tiongkok dengan Korea Selatan. Selain itu dari tahun 2017-2019 isu kabut asap CFD berada pada peringkat teratas sebagai isu lingkungan yang paling utama, dan paling banyak dibicarakan dengan persentase melebihi 50%.

Daftar Pustaka

- Al Syahrin, M.Najeri. 2018. *Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerjasama Keamanan Asia Timur*. Nation State Journal of International Studies Vol.1 No.1
- Associated Press. 2019. *S.Korea proposes rain project with China to clean Seoul air*. diakses dari <http://www.chinadailyhk.com/articles/50/74/218/1551852609774.html> pada 25 September 2019
- Austin, John.L. 2011. *How To Do Things With Words; In Is The Environment A Security Threat? Environmental Security Beyond Securitization*. International Affair Review vol.XX No.1
- Buzan, Bary dkk. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynee Rienner Publisher
- Chan Soo, Kang & Kang In Sik. 2015. *Fine Dust Pollution Rises in Seoul*. Korea JoongAng Daily
- DW. 2013. *Parts of Japan smothered in Chinese air pollution*.diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/en/parts-of-japan-smothered-in-chinese-air-pollution/a-16665471> pada 10 November 2019
- Floyd, Ryta. *Security and The Environment: Securitization Theory and the U.S Environmental Security Policy*. London: Cambridge University Press
- Fouser, Robert J. 2019. *Strong Measures Needed to Fight Fine Dust*. diakses dari <http://www.google.com/amp/m.koreaherald.com/amp/view.php%3fud=20190114000674> pada 3 november 2019
- Henry, Laura S. 2012. *From Smelter Fumes to Silk Road Winds: Exploring Legal Responses to Transboundary Air Pollution over South Korea*. Washington University Global Studies Law Review Vol 11 issue 3
- Jung, Tae Yong. *Regional Cooperation to bring clean air to South Korea*. diakses dari <https://www.eastasiaforum.org/2020/01/28/regional->

[cooperation-to-bring-clean-air-to-south-korea/](#) pada 30 Maret 2020

Kang, Dongmung dan Jong Eun Kim. 2014. *Fine, Ultrafine, and Yellow Dust: Emerging Health Problems in Korea*. Journal Korean Medical Science

Khaliq, Riyaz Ul. 2019. *South Korea Complains of Chinese Air Pollution*. diakses dari <http://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/south-korea-complains-of-chinese-air-pollution/1411458> pada 10 November 2019

Kim, Jiyong dkk. 2018. *Recent Status and Policy of Fien Dust in the Metropolitan Area of Korea*. International Journal of Environmental Science and Development, Vol.9 No.7

Kisaseung. *Environmental Issues Test Korea's Diplomacy*. diakses dari <http://m.jejuweekly.com/news/articleView.html?idxno=6106> pada 14 februari 2020

Ko, Dong Hwan. *Gov't gets tough on fine dust cosmetics*. dikases dari <http://m.koreatimes.co.lr/pages/article.asp?newsldx=247098> pada 26 Mei 2020

Lee, Tae Dong. 2019. *The First Step Towards ROK-China Cooperation on fine dust reductio: Achieve Consensus and Condust Joint Research*. EAI Issue briefing

Miller, Steve. *South Korea's Difficult Road Ahead to Combat Fine Dust*. diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.voanews.com/science-health/south-koreas-difficult-road-ahead-combat-fine-dust%3famp> pada 28 Mei 2020

Ministry of Environment. *Air Pollution*. diakses dari <https://eng.me.go.kr/eng/web/index.do?menuId=464> pada 26 Mei 2020

Ministry of Foreign Affairs Republic of South Korea. *Multilateral Environment Diplomacy*. diakses dari http://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_5654/contents.do pada 14 Mei 2020

Ministry of Foreign Affairs. *[Climate Change] ROK-China Joint Committe on Environmental Cooperation to Hold its 21st Meeting*.

diakses dari http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5658/view.do pada 26 Mei 2020

Ministry of Foreign Affairs. *Outcome of 23rd Meeting of ROK-China Joint Committee and Director-General-Level Meeting on Environmental Cooperation.* diakses dari http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=320351 pada 26 Mei 2020

Outsuka, Kenji. 2018. *Shift in China's commitment to regional environmental governance in Northeast Asia?*. Journal of Contemporary East Asia Studies

Permata, I. M., & Wahyuni, E. (2020). Behind the Ivory Trade Shutdown in China. Journal of International Wildlife Law & Policy, 23(3), 151-165, <https://doi.org/10.1080/13880292.2020.1825055>

Press Release, Outcome of 23rd Meeting of ROK-China Joint Committee and Director-General-Level Meeting on Environmental Cooperation, diakses dari http://mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=320351 pada 25 September 2019

Rezqi, Jhanna Baittiez. 2016. *Kebijakan Korea Selatan dalam Polusi Udara Lintas Batas Tiongkok.* Journal of International Relations Vol 2 No 1

Roh, Joori & Cynthia Kim. *South Korea proposes \$5.9 billion extra budget to fight air pollution.* diakses dari <https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1S0005> pada 27 maret 2020

Schott, JJ. 2015. *An Assesment of the Korea-China Free Trade Agreement.* Peterson Institute for International Economics

Shapiro, Matthew A & Toby Bolsen. 2018. *Transboundary Air Pollution in South Korea: An Analysis of Media Frames and Public Attitudes and Behaviour.* East Asia Community Rev

Shapiro, Matthew. 2016. *Transboundary air pollution in northeast asia: the political economy of yellow dust, particulate matter, and pm2.5.* Academic Paper Series KEI

- Sooyeon. *South Korea delivers public concerns over fine dust to China ar ministerial talks.* diakses dari <https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20191104005452315> pada 30 Maret 2020
- Soyeon, Kim. 2018. *Fine Dust Threatening Korean People's Health.* diakses dari <https://www.hanyang.ac.kr/surl/iQ1X> pada 8 November 2019
- Syahrin, M.Najeri Al. 2018. *Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerjasama Keamanan Asia Timur.* Nation State Journal of International Studies Vol.1 No.1
- The Straits Times. *'Truly Ashamed' Moon Jae In in calls for early warning system with China to fight dirty air.* diakses dari <https://www.thestraitstimes.com/asia/east-asia/truly-ashamed-moon-jae-in-in-calls-for-early-warning-system-with-china-to-fight-dirty> pada 27 Maret 2020
- Waeber, Ole. 1995. *Securitization and Desecuritization.* New York: Columbia University Press
- Yamada, Kenichi.2019. *Emission data scandal sparks health concerns in South Korea.* Nikkei Asian Review
- Yao Dong. 2018. *Air Quality Management Achievements, Challenges the Way Forward in China: Including PM2.5 and Other Major Air Pollution.* Japan Environmental Sanitation Center, Asia Center for Air Pollution Research
- Yonhap. *Air Pollution causes 17.000 deaths in S.Korea in 2017:study.* diakses dari <https://m-en.yna.co.kr/view/AEN2019040410800315> pada 5 Februari 2020
- Yonhap. *S.Korea, china discuss fine dust issues in prime ministerial talks.* diakses dari <http://m.koreaherald.com/amp/view.php?ud=20190327000826> pada 27 Maret 2020
- Yoshimatsu, Hidetaka. 2010. *Understanding Regulatory Governance in Northeast Asia: Environmental and Technological Cooperation among China, Japan, and Korea.* Asian Journal of Political Science Vol.18 No.3
- Zhou, X., Wang, Q., Zhang, W., Jin, Y., Wang, Z., Chai, Z., Zhou, Z., Cui, X., & MacMillan, D. C. (2018). Elephant poaching and the ivory trade: The impact of demand reduction and enforcement efforts by

China from 2005–2017. *Global Ecology and Conservation*, 16 e00486.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini.

Biografi

Eryolanda Putri Nabila merupakan alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Minat penelitiannya adalah isu-isu keamanan dan kajian hubungan internasional kawasan Asia Timur.